

BAB II

A. PROFIL ORGANISASI MUHAMMADIYAH

1. Sejarah Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KHA Dahlan. Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai Khatib dan para pedagang.

Mula-mula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung Kauman bahkan sampai ke luar daerah dan ke luar pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kini Muhammadiyah telah ada diseluruh pelosok tanah air. Disamping memberikan pelajaran/pengetahuannya kepada laki-laki, beliau juga memberi pelajaran kepada kaum Ibu muda dalam forum pengajian yang disebut

"Sidratul Muntaha". Pada siang hari pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan. Pada malam hari untuk anak-anak yang telah dewasa.

Disamping memberikan kegiatan kepada laki-laki, pengajian kepada ibu-ibu dan anak-anak, beliau juga mendirikan sekolah-sekolah. Tahun 1913 sampai tahun 1918 beliau telah mendirikan sekolah dasar sejumlah 5 buah, tahun 1919 mendirikan Hooge School Muhammadiyah ialah sekolah lanjutan. Tahun 1921 diganti namanya menjadi Kweek School Muhammadiyah, tahun 1923, dipecah menjadi dua, laki-laki sendiri perempuan sendiri, dan akhirnya pada tahun 1930 namanya dirubah menjadi Mu'allimin dan Mu'allimat. Muhammadiyah mendirikan organisasi untuk kaum perempuan dengan Nama 'Aisyiyah yang disitulah Istri KH. A. Dahlan, Nyi Walidah Ahmad Dahlan berperan serta aktif dan sempat juga menjadi pemimpinnya.

KH A Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke 11, Pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh KH Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934. Rapat Tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian hari berubah menjadi Muktamar tiga tahunan dan seperti saat ini Menjadi Muktamar 5 tahunan.⁴⁸

⁴⁸ <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html>

Pada masa kepemimpinan Ahmad Dahlan (1912-1923), pengaruh Muhammadiyah terbatas di karesidenan-karesidenan seperti: Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan, daerah Pekalongan sekarang. Selain Yogya, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922. Pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang, Agam. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar keseluruh Indonesia.

Tabel 2.1 Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Periode Kepemimpinannya⁴⁹

No	Nama	Awal Menjabat	Akhir Menjabat
1.	KH Ahmad Dahlan	1912	1923
2.	KH Ibrahim	1923	1932
3.	KH Hisyam	1932	1936
4.	KH Mas Mansur	1936	1942
5.	Ki Bagoes Hadikoesoemo	1942	1953
6.	Buya AR Sutan Mansur	1953	1959
7.	HM Yunus Anis	1959	1962
8.	KH Ahmad Badawi	1962	1968
9.	KH Faqih Usman	1968	1971
10.	KH AR Fakhruddin	1971	1990
11.	KHA Azhar Basyir	1990	1995
12.	Amien Rais	1995	2000
13.	Syafii Ma'arif	2000	2005
14.	Din Syamsuddin	2005	Sekarang

Sumber : <http://www.muhammadiyah.or.id>

⁴⁹ <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-155-det-direktori-ketua-umum.html>

2. Landasan Gerakan Muhammadiyah

a. Muqodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkaulah hamba menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada hamba akan jalan yang lempang, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat. "Saya ridla: Ber-Tuhan kepada ALLAH, ber-Agama kepada ISLAM dan ber-Nabi kepada MUHAMMAD RASULULLAH Shalallahu 'alaihi wassalam".

AMMA BAD'U, bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Ber-Tuhan dan ber'ibadah serta tunduk dan tha'at kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia. Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong-royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu.

Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga, adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-

Tuhan kepada Allah. Agama Islam adalah Agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia Dunia dan Akhirat.

Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentausa sebagai yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan Hari Kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci: beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di Dunia ini, dengan niat yang murni-tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridha-Nya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya, lagi pula harus sabar dan tawakal bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa.

Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur'an:

Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada ke-Islaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia " (AlQur'an, S. Ali-Imran:104).

Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912 Miladiyah, oleh almarhum KHA. Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai "gerakan Islam"

dengan nama "MUHAMMADIYAH" yang disusun dengan Majelis-Majelis (Bahagian-bahagian)-nya, mengikuti pererdaan zaman serta bersdaarkan "syura" yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawatan atau Muktamar.

Kesemuanya itu, perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw., guna menapat karunia dan ridla-Nya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentausa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah, sehingga merupakan: "Suatu negara yang indah, bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun". Maka dengan Muhammadiyah ini, mudah-mudahan ummat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang Syurga "Jannatun Na'im" dengan keridlaan Allah Yang Rahman dan Rahim.⁵⁰

b. Khitah Perjuangan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa Agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalat dunyawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut Muhammadiyah dapat mewujudkan atau

⁵⁰ <http://muhammadiyah/muqodimah-anggaran-dasar-muhammadiyah.html>

mengaktualisasikan Agama Islam menjadi rahmatan lil-'alamin dalam kehidupan di muka bumi ini.

Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup, serta khittah perjuangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab dalam mewujudkan "*Baladun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur*".⁵¹

Bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan. Pertama, melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (*real politics, politik praktis*) sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung (*high politics*) yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (*moral force*) untuk mewujudkan

⁵¹ <http://muhammadiyah/khittah-perjuangan-dalam-kehidupan.html>

Karena itu, Muhammadiyah senantiasa terpanggil untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan pada khittah perjuangan sebagai berikut:

Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (*al-umur ad-dunyawiyat*) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵²

Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan di mana nilai-nilai Ilahiah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, kebersamaan, dan keadaban untuk terwujudnya "*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*".

Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani (*civil society*) yang kuat sebagaimana tujuan

⁵² ibid

Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis.

Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan (*real politics*) untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Dalam hal ini perjuangan politik yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik hendaknya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945.

Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban.

Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.

Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggungjawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemaslahatan bangsa dan negara.

Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab (amanah), akhlak mulia (akhlaq al-karimah), keteladanan (uswah hasanah), dan perdamaian (ishlah). Aktifitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi Persyarikatan dalam melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar.

Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan mana pun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis dan berkeadaban.

c. Khitah Perjuangan Muhammadiyah⁵³

1) Hakikat Muhammadiyah

Perkembangan masyarakat Indonesia, baik yang disebabkan oleh daya dinamik dari dalam ataupun karena persentuhan dengan kebudayaan dari luar, telah menyebabkan perubahan tertentu. Perubahan itu menyangkut seluruh segi kehidupan masyarakat, diantaranya bidang sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan, yang menyangkut perubahan struktural dan perubahan pada sikap serta tingkah laku dalam hubungan antar manusia.

Muhammadiyah sebagai gerakan, dalam mengikuti perkembangan dan perubahan itu, senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi-mungkar, serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilihnya ialah masyarakat, sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya: "menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah SWT.

Dalam melaksanakan usaha tersebut, Muhammadiyah berjalan diatas prinsip gerakannya, seperti yang dimaksud di dalam Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah itu senantiasa menjadi landasan gerakan Muhammadiyah, juga bagi gerakan dan amal usaha dan

⁵³ <http://muhammadiyah/khittah-perjuangan-muhammadiyah/>

hubungannya dengan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan, serta dalam bekerjasama dengan golongan Islam lainnya.⁵⁴

2) Muhammadiyah dan Masyarakat

Sesuai dengan khittahnya, Muhammadiyah sebagai Persyarikatan memilih dan menempatkan diri sebagai Gerakan Islam amar-ma'ruf nahi mungkar dalam masyarakat, dengan maksud yang terutama ialah membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan Dakwah Jamaah. Di samping itu Muhammadiyah menyelenggarakan amal-usaha seperti tersebut pada Anggaran Dasar Pasal 4, dan senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan mutunya. Penyelenggaraan amal-usaha, tersebut merupakan sebagian ikhtiar Muhammadiyah untuk mencapai Keyakinan dan Cita-Cita Hidup yang bersumberkan ajaran Islam dan bagi usaha untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah SWT.⁵⁵

3) Muhammadiyah dan Politik

Dalam bidang politik Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khittahnya: dengan dakwah amar ma ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsionil, secara operasional dan secara kongkrit riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang

⁵⁴ ibid

⁵⁵ ibid

Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, materiil dan spirituil yang diridloi Allah SWT. Dalam melaksanakan usaha itu, Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada kepribadiannya. Usaha Muhammadiyah dalam bidang politik tersebut merupakan bagian gerakannya dalam masyarakat, dan dilaksanakan berdasarkan landasan dan peraturan yang berlaku dalam Muhammadiyah.

4) Muhammadiyah dan Ukhuwah Islamiyah

Sesuai dengan kepribadiannya, Muhammadiyah akan bekerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan Agama Islam serta membela kepentingannya. Dalam melakukan kerjasama tersebut, Muhammadiyah tidak bermaksud menggabungkan dan mensubordinasikan organisasinya dengan organisasi atau institusi lainnya.

5) Dasar Program Muhammadiyah

Berdasarkan landasan serta pendirian tersebut di atas dan dengan memperhatikan kemampuan dan potensi Muhammadiyah dan bagiannya, perlu ditetapkan langkah kebijaksanaan sebagai berikut:

Memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai Persyarikatan yang menghimpun sebagian anggota masyarakat, terdiri dari muslimin dan muslimat yang beriman teguh, ta'at beribacalah, berakhlak mulia, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat.

Meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kepekaan sosialnya terhadap persoalan-persoalan dan kesulitan hidup masyarakat.

Menetapkan kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah amar-ma'ruf nahi-mungkar ke segenap penjuru dan lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupan di Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

6) Kepribadian Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan Gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah Dakwah Islam dan Amar Ma'ruf nahi Munkar yang ditujukan kepada dua bidang: perseorangan dan masyarakat . Dakwah dan Amar Ma'ruf nahi Munkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan: Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan (tajdid), yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni; dan yang kedua kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam.

Adapun da'wah Islam dan Amar Ma'ruf nahi Munkar bidang kedua, ialah kepada masyarakat, bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar taqwa dan mengharap keridlaan Allah semata-mata.

Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, ialah "Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya".

3. Ideologi Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan spritual, duniawi dan ukhrawi.

Indonesia memasuki abad ke-20 adalah sebuah negeri yang muram. Setelah runtuhnya kekuasaan-kekuasaan monarkis di Nusantara, negeri ini terbelenggu oleh kolonialisme. Hampir segeap sendi kehidupan terpasung secara semena-mena bersamaan dengan munculnya berbagai praktik kolonialisasi yang sengaja merampas dan mencekeram hak dan hajat hidup kaum pribumi. Sejarah panjang kolonialisme itu berlangsung berabad-abad, sadis dan serakah, serta menimbulkan getir trauma dan cedera historis yang cukup parah. Indonesia terkoyak tanpa daya, dimana sebagian besar rakyatnya terbenam ke dalam kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.

Kyai Haji Ahmad Dahlan, satu di antara masyarakat kelas menengah pribumi itu. Meskipun sosoknya, barangkali hanya berupa "noktah kecil" dalam kanvas sejarah Indonesia yang menjalani hidup sekadar berdagang batik dan menjadi Khatib Amin di Masjid Agung Kasultanan Ngayogyakarta. Namun ternyata, kehadiran dan kiprah Kyai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya setampak noktah kecil itu, melainkan hadir dengan gagasan besar yang mencerahkan di tengah kemuraman nasib bangsa yang masih meringkuk dalam belenggu kolonialisme.

Lewat kosmopolitanisme pergaulannya di jalur perdagangan, perjalanan haji dan studinya di Makkah, Kyai Haji Ahmad Dahlan lantas kerap terlibat dalam renungan-renungan serius, sampai akhirnya berpikir keras untuk mengambil jalan baru perubahan sosial demi tumbuh dan berkembangnya Islam berkemajuan: sebuah reaksi segar untuk mengatasi keterbelakangan kaum pribumi, serta pembodohan dan pemiskinan akibat kolonialisasi yang terus berlangsung secara sistemik. Pikiran keras dan renungan serius itulah yang melahirkan gagasan-gagasan besar, sampai akhirnya memicu kelahiran Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912.⁵⁶

4. Organisasi Otonom dan Jaringan Muhammadiyah

a. Organisasi Otonom Muhammadiyah⁵⁷

Muhammadiyah juga memiliki beberapa organisasi otonom Muhammadiyah, yaitu:

⁵⁶ <http://www.muhammadiyah.or.id>

⁵⁷ <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-48-det-organisasi-otonom.html>

1) Aisyiyah

'Aisyiyah adalah sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah yang lahir hampir bersamaan dengan lahirnya organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Dalam kiprahnya hampir satu abad di Indonesia, saat ini 'Aisyiyah telah memiliki 33 Pimpinan Wilayah "Aisyiyah (setingkat Propinsi), 370 Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (setingkat kabupaten), 2332 Pimpinan Cabang 'Aisyiyah (setingkat Kecamatan) dan 6924 Pimpinan Ranting 'Aisyiyah (setingkat Kelurahan).

2) Ikatan Pelajar Muhammadiyah

Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) merupakan metamorfosis dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) yang berdiri tahun 1961. Interpretasi sejarah bisa jadi berbeda-beda dalam memandang perubahan nama dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke Ikatan Remaja Muham-madiyah. Namun, proses sejarah organisasi ini memang tidak sederhana.

3) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

Kelahiran IMM tidak lepas kaitannya dengan sejarah perjalanan Muhammadiyah, dan juga bisa dianggap sejalan dengan faktor kelahiran Muhammadiyah itu sendiri. Hal ini berarti bahwa setiap hal yang dilakukan Muhammadiyah merupakan perwujudan dari keinginan Muhammadiyah untuk memenuhi cita-cita sesuai dengan kehendak Muhammadiyah dilahirkan.

4) Nasyiatul Aisyiyah'

Berdirinya Nasyiatul Aisyiyah (NA) juga tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan rentang sejarah Muhammadiyah sendiri yang sangat memperhatikan keberlangsungan kader penerus perjuangan. Muhammadiyah dalam membangun umat memerlukan kader-kader yang tangguh yang akan meneruskan estafet perjuangan dari para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah. Gagasan mendirikan NA sebenarnya bermula dari ide Somodirdjo, seorang guru Standart School Muhammadiyah. Dalam usahanya untuk memajukan Muhammadiyah, ia menekankan bahwa perjuangan Muhammadiyah akan sangat terdorong dengan adanya peningkatan mutu ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada para muridnya, baik dalam bidang spiritual, intelektual, maupun jasmaninya.

5) Tapak Suci Putra Muhammadiyah

Perguruan Tapak Suci yang berkedudukan di Yogyakarta akhirnya berkembang di Yogyakarta dan daerah-daerah lainnya. Setelah meletusnya pemberontakan G30 S/PKI, pada tahun 1966 diselenggarakan Konferensi Nasional I Tapak Suci yang dihadiri oleh para utusan Perguruan Tapak Suci yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pada saat itulah berhasil dirumuskan pemantapan organisasi secara nasional, dan Perguruan Tapak Suci dikem-bangkan lagi namanya menjadi Gerakan dan Lembaga Perguruan

Seni Beladiri Indonesia Tapak Suci Putera Muhammadiyah. Dan pada Sidang Tanwir Muham-madiyah tahun 1967, Tapak Suci Putera Muhammadiyah ditetapkan menjadi organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah, karena Tapak Suci Putera Muham-madiyah juga mampu dijadikan wadah pengkaderan Muhammadiyah.⁵⁸

b. Jaringan Muhammadiyah

1) Jaringan Kepemimpinan Muhammadiyah

Tabel 2.2 Jaringan Kepemimpinan Muhammadiyah⁵⁹

No	Kepemimpinan	Data Tahun 2010
1.	Pimpinan Wilayah (PWM)	33
2.	Pimpinan Daerah (PDM)	417
3.	Pimpinan Cabang (PCM)	3221
4.	Pimpinan Ranting (PRM)	8107

Sumber: www.muhammadiyah.or.id

⁵⁸ ibid

⁵⁹ <http://www.muhammadiyah.or.id/id/jaringan-muhammadiyah>

2) Jaringan Amal Usaha

Tabel 2.3 Jenis Amal Usaha Muhammadiyah (sumber www.muhammadiyah.or.id)

No	Jenis Amal Usaha	Data Tahun 2010
1	Sekolah Dasar (SD)	1.176
2	Madrasah Ibtidaiyah/Diniyah (MI/MD)	1.428
3	Sekolah Menengah Pertama	1.188
4	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	534
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	515
6	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	278
7	Madrasah Aliyah (MA)	172
8	Pondok Pesantren	67
9	Akademi	19
10	Politenik	4
11	Sekolah Tinggi	88
12	Universitas	40
13	Perguruan Tinggi 'Aisyiyah	11
14	Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, BP	457
15	Panti Asuhan, Santunan, Asuhan Keluarga	318
16	Panti Jompo	54
17	Rehabilitasi Cacat	82
18	TK Aisyiyah Bustanul Atfal	2.289
19	Sekolah Luar Biasa (SLB)	71
20	Masjid	6118
21	Musholla	5080
22	Tanah	20.945.504

B. NEOLIBERALISME

Pada bab pertama telah diisyaratkan pendapat penulis bahwa krisis ekonomi 1997 dan masih buruknya kinerja perekonomian Indonesia hingga kini pada dasarnya disebabkan oleh karena integrasinya yang semakin erat pada tatanan kapitalisme internasional. Sebab-sebab lain dapat dianggap bersifat sekunder atau sekadar memperparah keadaan. Terkait erat dengan pandangan itu, maka bukan kebetulan jika soal mekanisme pasar telah disinggung berulang kali (secara langsung ataupun tidak) dalam pembahasan berbagai aspek perekonomian Indonesia. Mekanisme pasar itu sendiri adalah salah satu komponen utama dari tatanan kapitalisme.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai soal keterkaitan perekonomian Indonesia pada tatanan kapitalisme internasional, kita perlu mengenali dahulu beberapa konsep umum dan dimensi kesejarahannya yang mendunia. Oleh karena alasan teknis, pembicaraan kita akan lebih terfokus kepada dimensi ekonomi dari kapitalisme, serta perkembangannya yang lebih mutakhir saja. Sejarah dan dimensi lainnya yang lebih kompleks hanya dibicarakan secara singkat.

1. Neoliberalisme Sebagai Bentuk Mutakhir dari Kapitalisme

Neoliberalisme sebagai gagasan sudah dikenal sejak tahun 1930- an. Sebagai bagian dari perkembangan pemikiran ekonomi kapitalisme, konsep ini adalah kelanjutan dari konsep liberalisme.

a. Perkembangan Neoliberalisme⁶⁰

Ada tiga ide dasar dalam liberalisme (klasik) sebagai sistem atau tatanan ekonomi, yaitu: (1) pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) diakuiinya kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi; dan (3) pembentukan harga barang-barang melalui mekanisme pasar yang sepenuhnya bebas.

Gagasan pokok neoliberalisme dapat dipahami sebagai penyempurnaan ide dasar dari liberalisme klasik tersebut. Pemikir yang sering dianggap sebagai penggagas neoliberalisme (sebagai ide-ide sistematis) adalah Alexander Rustow, yang kemudian disempurnakan oleh para ekonom mazhab Chicago dan Mazhab Freiburger. Perbedaan yang paling mendasarnya dengan liberalism klasik adalah pada ide tentang pembentukan harga pasar yang ternyata tidak bersifat alami, melainkan memerlukan campur tangan negara. Namun, penertiban pasar yang dilakukan negara itu adalah Neoliberalisme Sebagai Bentuk Mutakhir Kapitalisme melalui penerbitan peraturan perundang-undangan. Perlu dicatat bahwa maksudnya adalah agar mekanisme pasar bisa segera terbentuk dan operasional, tidak terintangi oleh faktor-faktor kelembagaan (seperti pranata sosial).

Berkaitan dengan penertiban pasar ini, ada beberapa gagasan pokok tentang peranan regulasi negara dan apa yang dapat dilakukan oleh negara. Yang terutama adalah: (1) pengaturan persaingan untuk mencegah monopoli dan kartel; (2)

⁶⁰ Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, *Neoliberalisme mencengkrum Indonesia*, Jakarta: E Publishing Company. 2008 hal 231

pengaturan pemungutan pajak untuk mendorong investasi dan pembagian pendapatan; (3) pengaturan ketenagakerjaan untuk menghindari terjadinya eksploitasi; dan (4) pengaturan sistem pengupahan, khususnya untuk menetapkan jumlah upah minimum (Baswir, 2006).⁶¹

Gagasan neoliberalisme yang awal ini kemudian agak “tenggelam”, karena *varians* yang lebih dominan sejak usai PD II sampai dengan era tahun 70-an adalah yang berasal dari Keynes dan Keynesian, semacam konsep negara kesejahteraan. Perbedaan paling pokoknya adalah mengenai “dosis” peran negara, yang lebih besar pada konsep Keynesian. Peran negara tidak sekadar penertiban agar mekanisme pasar bisa beroperasi dengan baik melalui regulasi. Melainkan memang ada intervensi, dimana negara (pemerintah) menjadi pelaku ekonomi (sebagai produsen dan konsumen) yang amat menentukan keadaan pasar.

Kondisi perekonomian Eropa Barat ketika itu memang tengah membutuhkan “dorongan” negara agar memulihkan infrastruktur yang hancur akibat perang, dan akan lebih efektif jika negara campur tangan secara aktif. Sementara itu, di negara-negara yang baru merdeka, para pemilik modal internasional lebih suka berurusan dengan kaum elit (diktator atau oligarki) yang menguasai negara, seperti yang terjadi dalam kasus Indonesia.

Mulai awal tahun 80-an, gagasan neoliberal kembali ke permukaan, dimana Reagan dan Thatcher adalah pemimpin negara adidaya yang menjadi ujung tombak

⁶¹ http://semogasemuainibenar.blogspot.com/2009/01/krisis-multidimensi_19.html

kebangkitan *varians* pemikiran kapitalisme jenis ini. Perkembangan perekonomian di Amerika Utara dan Eropa Barat membutuhkan taktik dan teknik baru (seperti pengurangan pajak, pelonggaran aturan tertentu, kemudahan mobilitas modal, dsb). Gagasan neoliberal kemudian menjadi dominan sejak pertengahan 90-an, termasuk di negara-negara sedang berkembang (NSB). Di NSB, sebagian besarnya, menjadi dominan karena pemaksaan atau “rekayasa” lewat ujung tombak kaum neoliberal lainnya, yaitu IMF.

Salah satu ide terpentingnya, yakni pengurangan peran negara dalam perekonomian, mendapat momentum penerapan di negara industri dan di negara terbelakang. Kinerja perekonomian yang memburuk di berbagai negara (secara bersamaan maupun dengan sedikit perbedaan kurun waktu) dianggap disebabkan oleh kegagalan pemerintah (*government failures*). Yang disoroti di negara industri adalah soal membengkaknya pengeluaran pemerintah yang mengakibatkan defisit berkepanjangan, serta persoalan derivatifnya seperti: inefisiensi birokrasi dan efek kontraksi bagi investasi swasta (*crowding out*). Sedangkan di negara berkembang, soalnya diperparah oleh berbagai krisis yang dialami, seperti : krisis utang, krisis moneter, krisis neraca pembayaran internasional, dan lain sebagainya.

Khusus untuk kondisi perekonomian negara-negara berkembang, yang sebagian besarnya sempat mengalami krisis (meskipun berbeda skala dan kurun waktunya), neoliberalisme memperoleh momentum “sosialisasi” konsepnya. Pada awalnya, berbagai isi dari konsep itu agak tersamar dan disebarkan melalui berbagai

forum dan program ekonomi internasional. Neoliberalisme juga lebih banyak "bersembunyi" dibalik tema globalisasi. Konsepnya menjadi dikenal publik luas secara lebih sistematis ketika diperkenalkan oleh John Williamson sebagai Konsensus Washington (*Washington Consensus*) pada akhir tahun 1980-an. Yang dimaksud adalah kesamaan pandangan lembaga-lembaga yang bermarkas di Washington (IMF, World Bank, dan US Treasury Department) mengenai rekomendasi kebijakan bagi negara-negara berkembang yang dilanda krisis. Tentu saja rekomendasi itu merupakan "pemaksaan secara halus" karena lembaga-lembaga itu (dan yang berada di bawah pengaruhnya) memiliki kekuasaan atas banyak hal (seperti akses dana yang besar) yang dibutuhkan dalam mengatasi krisis.⁶²

Pada tahun-tahun kemudian, Wiliamson mengakui bahwa Konsensus Washington memang merupakan konsep berdasar neoliberalisme. Kita bahkan bisa menyamakan penyebutan keduanya hingga kurun waktu sampai dengan akhir 1990-an. Pada dekade berikutnya memang ada beberapa revisi dari kalangan ekonom neoliberal sendiri atas Konsensus Washington. Akan tetapi neoliberalisme tampak masih menjadi konsep utama yang dianut. Wacana globalisasi pun masih diandalkan sebagai sarana sosialisasi yang efektif.

Terlepas dari hal itu, keberhasilan gagasan neoliberal (terutama Konsensus Washington) mudah diterima secara luas sebagai sebuah dogma pembangunan ekonomi juga terletak pada kesederhanaannya, sebagaimana yang disinyalir Stiglitz

⁶² Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, Op. Cit hal 235

(2002). Rekomendasi kebijakan yang diturunkan dari butir-butirnya bisa dikelola dengan menggunakan instrumen serta indikator perekonomian yang sederhana. Indikator seperti tingkat inflasi, pertumbuhan pasokan uang (*money supply*), tingkat suku bunga, defisit anggaran dan perdagangan bisa dijadikan dasar bagi seperangkat rekomendasi kebijakan perekonomian makro dalam waktu yang relatif singkat.

Lebih jauh dikatakan Stiglitz bahwa keunggulan lain dari *Washington Consensus* dalam merekomendasikan kebijakan adalah fokusnya pada isu-isu prioritas utama ekonomi makro, kemampuannya menciptakan kerangka yang mudah dipahami serta relatif bebas dari subjektivitas pengamatan individu dan memberikan batasan yang jelas dengan memusatkan informasinya semata pada prasyarat dasar pembangunan ekonomi.

Secara sederhana, *Keynesian* yang memberi porsi peran negara lebih besar, akan bertumpu pada kemampuan fiskal (keuangan) pemerintah. Untuk mendukung peran negara yang cukup besar dalam perekonomian, untuk membangun suatu negara kesejahteraan, pengeluaran atau belanja negara akan makin besar, yang berarti membutuhkan pendapatan yang makin besar pula. Di negara maju, pendapatan negara terutama sekali bersumber dari pajak. Sedangkan di negara yang belum maju, bersumber dari pendapatan sumber daya alamnya (SDA), serta dari Utang luar negerinya (ULN).

Dalam konteks ULN inilah peran lembaga kreditur “bantuan resmi” internasional semacam *World Bank/IBRD* (Bank Dunia), ADB, dan lembaga

sejenisnya menjadi sangat penting. Forum yang khusus untuk melayani suatu negara, atau kawasan tertentu, semacam IGGI/CGI adalah partnernya. Negara-negara kaya, lembaga kreditur bantuan resmi internasional, serta lembaga keuangan komersial internasional merupakan “pemasok” ULN. Sebagian besar ULN pada awalnya “dikemas” bersifat bantuan, sangat lunak. Perhatikan penyebutannya yang utama adalah *Official Development Assistance* (ODA), bantuan resmi pembangunan. Sebetulnya, negara-negara Eropa sendiri sempat dipasok ULN oleh Amerika melalui *Marshall Plan*, setelah berakhirnya PD II. Bahkan keberhasilan program tersebut dijadikan salah satu dasar argumen perlunya ULN bagi NSB.

Namun banyak hal yang berbeda, terutama pada “kemampuan” memanfaatkan faktor ULN tersebut untuk membangun perekonomian. Negara-negara Eropa Barat, pasca PD II, menggunakan ULN untuk “pemulihan” perekonomiannya. Sementara itu, NSB menggunakannya untuk “memulai” pembangunan perekonomian. Bisa diduga, hasilnya amat jauh berbeda, dengan sedikit pengecualian, seperti Korea Selatan. Singkat cerita, gagasan neoliberalisme untuk mengurangi porsi peran negara menjadi lebih menarik dan layak dijalankan.

2. Cara Agenda Neoliberalisme Disosialisasikan⁶³

Ada berbagai macam cara agar agenda neoliberalisme, yang pandangan pokoknya berasal dari konsensus washington, secara umum dilaksanakan di Negara Sedang Berkembang (NSB), secara sukarela maupun terpaksa. *Pertama*, melalui

⁶³ Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, hal 245

penjelasan “akademis” tentang keuntungan-keuntungannya. Para ahli ekonomi dan keuangan di NSB “dicekoki” argumen yang sulit dibantah (meskipun kita telah memberi contoh sebagian bantahan dari Stiglitz). Ditambah lagi dengan sebagian dari para ahli ekonomi NSB itu memang diuntungkan secara finansial, melalui keahlian dan afiliasi politiknya. Sosialisasi gagasannya mulai dari pendidikan umum pada level S1 fakultas Ekonomi sampai dengan berbagai “bantuan teknik”, seperti: pelatihan dan penyediaan berbagai manual pelaksanaan bagi para staf ahli, birokrat dan bankir di NSB. Sangat mirip dengan cara pada saat mulai mengalirkan ULN dan PMA ke NSB beberapa dasawarsa lalu. Istilah mafia *barkeley* atau mafia *poros washington*, untuk kasus Indonesia, cukup menggambarkan tentang hal ini.

Ada langkah lain yang bersifat lebih halus (sehingga perlu ekstra kritis untuk memahaminya), namun merupakan bagian dari cara, yakni mengembangkan ilmu dan teknik akuntansi (keuangan) yang sesuai. Langkah ini sudah berlangsung sejak lama (beriringan dengan pertumbuhan kapitalisme), dan pada era neoliberalisme sekarang hanya bersifat penyempurnaan. Dengan begitu, soal standarisasi akuntansi (“catat mencatat” dan perhitungan keuangan) saja sebenarnya tidaklah objektif atau bebas nilai, melainkan telah diformulasi untuk kepentingan kaum kapitalis. Sebagai contoh, salah satu yang mendasar adalah arti dan seluk beluk perhitungan nilai tambah dalam akuntansi.⁶⁴ Ilmu akuntansi secara sistematis telah dirancang untuk menyembunyikan adanya eksploitasi terhadap tenaga kerja, pengrusakan lingkungan, serta monetarisasi (materialisasi) hampir semua unsur kemanusiaan.

⁶⁴Aji Dedi Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syariah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2006

Kedua, pendiktean kebijakan yang harus dijalankan NSB melalui perjanjian dengan IMF. Perjanjian tersebut, dikenal dengan *Letter of Intent* (LoI), terpaksa dilakukan karena NSB butuh pasokan devisa buat mengatasi krisis keuangan yang dialami. Krisis tersebut umumnya berbentuk kemerosotan nilai tukar yang drastis dalam waktu singkat. Bentuk-bentuk krisis lainnya, sebagian merupakan derivasi dan ada juga penyebab dari krisis utama tadi, antara lain: deficit neraca pembayaran yang terus menerus karena ekspor tidak bisa mengimbangi impornya, atau karena pelarian modal keluar negeri (*capital flight*); krisis utang, dimana pembayaran cicilan dan bunga sudah tak bertanggung lagi; produksi domestik menjadi merosot tajam karena ketidakmampuan membiayai input yang harus dibeli dari luar negeri; iklim investasi yang tidak bergairah menyusul keadaan sektor keuangan yang tidak stabil; inflasi yang mulai tidak terkendali, dan sebagainya. Singkatnya, paket kebijakan dengan gagasan dari konsensus washington, neoliberalisme, harus dijalankan NSB sebagai syarat pasokan bantuan dari IMF.⁶⁵

Ketiga, rekayasa melalui lembaga-lembaga internasional, seperti *World Trade Organisation* (WTO) dan *Bank for International Settlements* (BIS), untuk menjalankan secara “sukarela” beberapa bagian dari agenda neolib. Yang dikembangkan antara lain adalah argumen “saling menguntungkan” bagi perdagangan bebas. Dalam kasus BIS yang dikedepankan adalah sistem keuangan dan perbankan yang dikesankan akan memperkuat daya tahan perekonomian suatu

⁶⁵ Ibid hal 248

negara teradap goncangan eksternal. Sifat pemaksaannya dihaluskan, dimana jika tidak bersedia ikut, maka tak akan disertakan atau “dikucilkan” dari transaksi perdagangan internasional, termasuk transaksi keuangan (perbankan).

Yang menarik dalam hal peran lembaga-lembaga internasional tersebut adalah kecerdikan untuk mengoptimalkan siklus naik turunnya pamor dari masing-masing lembaga. Di masa lalu, *World Bank* sangat berpengaruh, terutama sekali dalam rekomendasinya agar suatu negara di beri utang oleh negara industri atau lembaga keuangannya, serta akses kepada bantuan dari *World Bank* sendiri. IMF kala itu sudah eksis, namun “kurang aktif”. Baru kemudian setelah masalah neraca pembayaran internasional banyak negara bermasalah (yang sebenarnya bersumber dari masalah utang piutang luar negeri dan ketimpangan perdagangan internasional), IMF mulai berperan penting, bahkan mengalami era keemasannya. Secara hampir bersamaan, WTO yang sejatinya cuma forum pertemuan, juga mulai naik daun terkait dengan topik perdagangan (yang lebih) bebas. Sekarang ini, pamor IMF mulai turun, dikritik dimana-mana dan utang terhadapnya segera dilunasi oleh banyak negara. Posisi *World Bank* sedikit membaik karena lebih banyak terlibat dalam tema kemiskinan. Sementara itu, kedudukan WTO masih naik turun, belum *established*. Akan tetapi, telah ada lembaga lain yang tengah naik daun, yaitu *Bank for International Settlements* (BIS). BIS sejatinya hanya forum antar bank sentral, namun memiliki pengaruh kuat dalam soal penciptaan *best practices* bagi dunia perbankan dan sistem finansial pada umumnya. *Bassel I* dan *Bassel II* diakomodasi oleh

kebanyakan negara, termasuk oleh Indonesia, yang ujungnya adalah liberalisasi sektor keuangan dan integrasi industri perbankan secara internasional.

Keempat, perbaikan operasional perusahaan-perusahaan multinasional (MNC). Sebagian dilakukan agar memudahkan transfer keuntungan, atau dalam bentuk yang lebih luas adalah *transfer pricing*, yang dibuat menjadi rumit bagi pihak lain (para penentang) untuk difahami. Cukup sulit untuk menghitung secara akurat *transfer pricing* dari MNC yang beroperasi di suatu negara ke para pemilik modalnya, karena bisa melalui banyak cara (seperti: pembelian pasokan, pemasaran, penggunaan jasa, dsb dari jaringannya sendiri). Belum lagi jika memperhitungkan mekanisme pasar valuta asing dan pasar modal yang dimanfaatkan untuk hal tersebut. Siapa pun tidak mudah mencari nama individual (orang), siapa saja sebenarnya yang memiliki modal besar di dunia saat ini, mengingat tatacara persahaman dan obligasi yang berlapis-lapis. Selain itu, perbaikan operasional MNC dilakukan dengan perubahan wajah yang bisa bekerjasama dengan simbol domestik (perusahaan patungan, anak perusahaan, kepemilikan saham dominan, dsb), jika dibutuhkan. Wajah kemanusiaan dengan iklan di media masa atau dukungan (pendanaan) atas program yang bersifat sosial kerap dikedepankan. Hal ini lebih mungkin dilakukan jika bersamaan dengan cara kelima.

Kelima, membangun hubungan yang makin kuat dan saling menguntungkan dengan kaki tangannya di NSB. Kaum kapitalis domestik, sebagai salah satunya, memang sempat mengalami hubungan yang buruk, namun proses jual beli korporasi

domestik dan transaksi keuangan yang terjadi, memperlihatkan ada kesepakatan baru yang tercapai. Pendukung utama lainnya adalah para politisi yang *in power*, serta para ekonom dan bankir yang sedang berposisi penting.

Tema gerakan anti asing di banyak negara pada masa lalu menjadi pelajaran bagi modal internasional untuk membuat pola-pola yang lebih “rumit”, sehingga perlawanan serupa bisa diminimalkan. Orang kebanyakan akan sulit mengerti bahwa perusahaan rokok Sampurna adalah milik asing; begitu pula dengan bank BCA, dan hanya soal waktu bank lain yang sebagiannya masih disebut bank persero (pemerintah). Dimana utang luar negeri sepertinya berkurang dan digantikan oleh utang dalam negeri, namun hakikatnya tetap saja lebih banyak kepada pihak asing. Pola bagi hasil atau kontrak karya dengan perusahaan asing dalam eksplorasi sumber daya alam dikesankan membaik (porsi domestik membesar), namun dicari kiat lain untuk mendapat keuntungan berlebih bagi modal internasional. Cermati soal penggelembungan ongkos operasional, *cost recovery*, dan jangan lupa berbagai taktik *transfer pricing* yang *sophisticated* (oleh karena jaringan bisnis internasional terkait dengan industri ini dikuasai sepenuhnya oleh mereka).

Keenam, pendekatan “kultural”, mengembangkan tema globalisasi yang menjanjikan bagi perkembangan umat manusia. Tema ini disosialisasikan melalui media populer, cetak dan elektronik. Dunia yang satu, dan satu untuk semua, atau slogan sejenis dihembuskan kepada masyarakat luas di NSB, khususnya bagi yang terpelajar.

Ketujuh, jika dianggap perlu, memecah belah komponen masyarakat, semacam *divide et impera* versi baru. Tema disintegrasi negara, konflik horisontal, kesenjangan pendapatan, dan sebagainya, kadang-kadang dipakai untuk mengamankan kepentingan mereka. Setidaknya agar biaya modal menjadi lebih murah, mengingat tingginya kemampuan negosiasi suatu negara yang kuat dan kohesif. Strategi yang dilaksanakan kadang bersifat moderat, yakni mengkondisikan agar tidak tercipta kohesivitas masyarakat dan negara kuat yang berpihak kepada rakyat banyak. Langkah semacam yang terakhir ini justru suka ditampilkan dalam wajah demokrasi, yang oleh para pengkritik disebut dengan demokrasi pasar.⁶⁶

Semua cara tersebut diramu, kadang secara agak berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Strategi dasarnya tetap sama. Sebagian besar nya dikemas berupa janji manis akan terciptanya keadaan yang lebih baik. Tak sembarang janji, tetapi dengan penalaran yang sistematis. Sebagai percepatan sosialisasinya, ada pula unsure pemaksaan politik, melalui negara adi daya, IMF ataupun lainnya.⁶⁷

3. Dampak Dominasi Neoliberalisme bagi Perekonomian Negara Berkembang

Ketika berbagai kebijakan neoliberalisme direkomendasikan ke hampir semua negara berkembang, paketnya digambarkan sebagai satu-satunya jalan menuju kemakmuran ekonomi global saat ini. Para penganjurnya bahkan menjadi lebih bersemangat setelah satu sampai dua dasawarsa kebijakan neoliberalisme dijalankan. Negaranegara yang mengalami krisis pada pertengahan dan akhir tahun 1990-an

⁶⁶ Coen Husain Pontoh, *Malapetaka Demokrasi Pasar*, Resist Book, Yogyakarta, 2005

⁶⁷ Rizky, Awalil dan Nasyith Majidi, op. Cit Hal 245-251

justeru dianggap tidak menerapkan atau setidaknya kurang konsisten dalam penerapannya.

Sementara itu, pembahasan kita telah mengarah kepada kesinambungan dominasi kapitalisme atas perekonomian dunia, dan neoliberalisme hanyalah bentuk mutakhirnya yang berlangsung hampir tiga dekade ini (terhitung sejak awal 1980-an). Segala macam "janji" neoliberalisme harus ditelusuri sejak era-era sebelumnya, baik dari aspek konseptual maupun realita yang berkembang.

Kita memang akan kesulitan memisahkan antara kehidupan dunia modern dengan kapitalisme. Segala macam kemajuan teknologi, peningkatan produksi barang dan jasa, taraf kehidupan rata-rata yang meningkat, dan lain sebagainya bisa saja diklaim sebagai bukti keberhasilan tatanan perekonomian kapitalisme. Kemajuan itu akan tampak jelas jika dilihat dari ukuran-ukuran teknis ekonomi, seperti : pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, nilai perdagangan antar negara, ketersediaan barang dan jasa, tingkat konsumsi, dan berbagai ukuran konsumsi lainnya.

Jika kita sederhanakan, keberatan yang utama dari para pengkritik neoliberalisme adalah pada ketidakadilan dalam soal distribusi sumber-sumber ekonomi dan pendapatan. Ada ketimpangan yang lebar dan cenderung semakin melebar dalam perbandingan antara negara-negara yang industri maju dan yang sedang berkembang, dan antara orang-orang yang kaya dengan yang miskin di seluruh dunia. Bahkan, ada pula yang melihat terjadinya perlambatan pertumbuhan

produksi total dalam banyak komoditi penting sejak neoliberalisme menjadi konsep kebijakan yang dominan di seluruh dunia.⁶⁸

4. Jejak Dominasi Neoliberalisme di Indonesia

Jejak ekonomi Neoliberalisme di Indonesia dapat ditelusuri ketika Indonesia mulai memasuki era Pemerintahan Orde Baru sejak Maret 1966. Ketika kebijakan Orde Baru (Orba) lebih berpihak pada Barat. Dengan membaiknya politik Indonesia dengan negara-negara Barat maka arus modal asing mulai masuk ke Indonesia. Penanaman Modal Asing (PMA) dan utang luar negeri mulai meningkat.

Menjelang awal tahun 1970-an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB) dibentuk suatu konsorsium Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara industri maju untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Saat itulah Indonesia dianggap telah menggeser sistem ekonominya dari Sosialisme ke arah semi Kapitalisme.

Memasuki periode akhir 1980-an dan awal 1990-an, sistem ekonomi di Indonesia terus mengalami pergeseran. Kebijakan ekonomi Pemerintah banyak dibawa ke arah liberalisasi ekonomi; baik liberalisasi sektor keuangan, sektor industri, maupun sektor perdagangan.

Pakto '88 dapat dianggap sebagai titik tonggak kebijakan liberalisasi ekonomi di Indonesia. Menjamurnya industri perbankan di Indonesia, yang selanjutnya diikuti

⁶⁸ Rizky, Awalil dan Nasyith Majidi, op. Cit Hal 254

dengan terjadinya transaksi utang luar negeri perusahaan-perusahaan swasta yang sangat pesat, mewarnai percaturan ekonomi liberal Indonesia saat itu.

Masa pembangunan ekonomi Orba pun akhirnya berakhir. Puncak kegagalan dari pembangunan ekonomi Orba ditandai dengan meledaknya krisis moneter yang diikuti dengan ambruknya seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia. Pasca krisis moneter, memasuki era reformasi, ternyata kebijakan perekonomian Indonesia semakin liberal. Dengan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF Indonesia benar-benar telah menuju liberalisasi ekonomi. Hal itu, paling tidak, dapat diukur dari beberapa indikator utama yaitu:⁶⁹

1. Dihapuskannya berbagai subsidi Pemerintah secara bertahap dan diserahkan harga barang-barang strategis ke mekanisme pasar.
2. Nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas (floating rate) sesuai dengan kesepakatan dalam LoI dengan pihak IMF, artinya harus dikembalikan pada mekanisme pasar.
3. Privatisasi BUMN, yaitu dengan menjualnya kepada pihak swasta, baik swasta nasional maupun asing.
4. Peran serta Pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan Perjanjian GATT, yang semakin memperjelas komitmen Indonesia untuk masuk dalam 'kubangan' liberalisasi ekonomi dunia atau Kapitalisme global.

⁶⁹ <http://suarapembaca.detik.com/read/2009/05/25/132503/1136671/471/neoliberalisme-dan-indonesia>

Dampak yang Ditimbulkan⁷⁰

Dampak ekonomi Neoliberal bagi Indonesia setidaknya ada 3 yaitu:

1. Dikuasainya sektor kepemilikan umum oleh swasta. Akibat menganut sistem mekanisme pasar bebas Pemerintah Indonesia harus melepaskan perannya dalam berbagai pengelolaan ekonomi yang ditandai dengan banyak dikuasainya sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak (sektor kepemilikan umum) -- baik dengan cara langsung maupun melalui proses privatisasi BUMN oleh swasta.

Sebagai contoh di bidang kehutanan. Sejarah industri perkebunan berawal dari pemberian Hak Pengusaha Hutan (HPH). Ditandai dengan keluarnya PP No 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH). Dengan luas hutan tropis yang sangat menjanjikan pada waktu itu, yaitu 143,7 juta hektar atau sekitar 76% luas daratan Indonesia, Pemerintah berharap pemberian HPH tersebut dapat menopang pembangunan Indonesia. Namun, apa yang terjadi? Pada masa Orde Baru, rata-rata hasil eksploitasi hutan di Indonesia setiap tahunnya adalah 2,5 US\$ miliar. Dari hasil itu, yang masuk ke dalam kas negara hanya 17%, sedangkan sisanya sebesar 83% masuk ke kantong pengusaha HPH.

Pada masa Orba tersebut, sebagian besar hutan di Indonesia sudah dikuasai oleh dua belas (12) grup besar melalui 109 perusahaannya. Memasuki masa Orde Reformasi Indonesia tinggal menuai getahnya. Menurut laporan Badan Planologi Departemen Kehutanan (laporan tahun 2003) diperkirakan kerusakan hutan Indonesia

⁷⁰ Harian Batak Pos edisi senin 25 mei 2009 NEOLIBERALISME DI INDONESIA oleh Arief Arfianto,

sudah mencapai 101,79 juta hektar dengan laju pertumbuhan kerusakan (deforestasi) sekitar 3,8 juta hektar per tahun.

Dalam bidang perminyakan, pada zaman Orba, hampir semua sumur minyak di Indonesia telah dikuasai oleh perusahaan raksasa minyak asing yang merupakan perusahaan multinasional seperti Exxon (melalui Caltex), Atlantic Richfield (melalui Arco Indonesia), dan Mobil Oil. Selebihnya adalah Pertamina dan sebagian kecil swasta nasional lainnya.

Pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kondisinya semakin liberal lagi. Jika pada masa-masa sebelumnya Pertamina senantiasa memegang monopoli distribusi minyak di dalam negeri maka mulai November 2005 Pemerintah membuka keran investasi hilir di bidang migas kepada investor swasta dalam negeri maupun asing.

Jika Pemerintah membuka keran liberalisasi di sektor hilir migas, maka tuntutananya hanya satu, yaitu tidak boleh ada yang memperoleh fasilitas subsidi sebagaimana yang selama ini diterima oleh Pertamina. Berarti subsidi BBM harus dicabut sampai 0%. Dapat dipastikan bahwa harga BBM bakal naik lagi. Namun, dengan merek yang berbeda-beda. Paling tidak sudah siap 7 merek BBM dengan harga yang sama-sama mahal.

Bidang energi yang lain adalah batubara. Batubara menjadi sumber energi terbesar kedua setelah minyak. Minyak memasok 34% dan batubara 23,5% kebutuhan energi dunia. Hampir sepertiga cadangan batubara dunia ada di kawasan

Asia Pasifik. Di Indonesia jumlah sumberdaya batubara, termasuk yang ditemukan produsen dan kontraktor kerja sama, sampai tahun 2001 mencapai 145,8 miliar ton. Produksi batubara Indonesia mayoritas dihasilkan oleh penambangan swasta. Dari total produksi 100,625 juta ton pada tahun 2002, 96,6% dihasilkan oleh penambang swasta.

Dalam bidang pertambangan, Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai potensi tambang yang bagus. Khusus untuk tambang emas saja, secara geologis di berbagai wilayah di Indonesia memiliki potensi emas yang besar. Indonesia merupakan pertemuan deretan gunung berapi Sirkum Mediteran dengan Sirkum Pasifik. Pergeseran lempengan bumi yang terjadi di masa lampau akibat kegiatan vulkanis telah membentuk cebakan-cebakan emas. Dengan bagusnya potensi tambangnya ditambah aturan-aturan yang menguntungkan Indonesia mulai kedatangan investor asing untuk menanamkan modalnya. Dimulai sejak tahun 1967.

Perusahaan yang mengawalinya adalah PT Freeport Indonesia (FI). Pada Kontrak Karya generasi I (KK I), FI mendapat konsesi selama 30 tahun, boleh mengimpor semua peralatannya (tidak wajib menggunakan produksi dalam negeri) dan Pemerintah Indonesia hampir tidak mendapat kompensasi apa pun. Pada tahun 1988 secara tak terduga FI menemukan deposit emas yang sangat besar di Grasberg. Kemudian mengajukan pembaharuan KK dan bisa diperpanjang dua kali 10 tahun. FI mendapat KK V bersama 6 perusahaan tambang lainnya.

Berbeda dengan KK I, produk utama FI adalah emas, bukan hanya tembaga. Namun, menurut Econit, royalti yang diberikan FI ke Pemerintah tidak berubah, hanya 1-3,5%, sehingga penerimaan Pemerintah dari pajak, royalti, dan deviden FI hanya US\$ 479 juta. Jumlah itu tentu masih sangat jauh dibandingkan dengan pendapatan yang mampu dihasilkan FI yaitu sekitar US\$ 1,5 miliar (tahun 1996). Dari pendapatan itu 1% diambil untuk dana pengembangan masyarakat Papua yaitu sebesar US\$ 15 juta.

Pada zaman Reformasi nasib PT FI semakin bersinar. Pada tahun 2001 laba bersih yang dibukukan perusahaan ini mencapai US\$ 304,2 juta. Pada tahun 2002 naik menjadi US\$ 398,5 juta. Tahun berikutnya, 2003 laba bersihnya melonjak hingga US\$ 484,9 juta. Yang mengherankan, dari laba bersih sebesar itu sesungguhnya yang dibagikan sebagai deviden hanya 15%-nya saja. Padahal Pemerintah sampai saat ini hanya memiliki saham sebanyak 9,36%. Sedangkan PT FI menguasai 90,64%.

Dalam hal penguasaan pertambangan oleh pihak asing telah terjadi pengaplingan atas daerah-daerah tambang di Indonesia. Kapling-kapling itu meliputi: Timika untuk FI, Lhok Seumawe untuk Exxon Mobil, Sulawesi Selatan untuk Mosanto, Buyat Minahasa dan Sumbawa untuk Newmont International, Teluk Bintun di Papua untuk British Petroleum, Kalimantan Timur untuk PT Kaltim Prima Coal,

dan sebagainya.⁷¹ Pengaplingan tersebut menunjukkan telah terjadi persekongkolan antara penguasa dan kekuatan modal asing.

2. Bobroknya lembaga keuangan dan masuknya Indonesia ke dalam jerat utang (debt trap). Konsekuensi berikutnya dari sistem pasar bebas adalah adanya liberalisasi di pasar uang yang berbasis bunga. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 membuka semua tabir kerapuhan perbankan konvensional yang berbasis pada sistem bunga. Akibat krisis itu 16 bank dilikuidasi Pemerintah. 51 bank lainnya dibekukan pada 1 November 1997, dan 13 bank diambil-alih (BTO). Untuk merestrukturisasi bank-bank konvensional yang selama ini menjadi sumber darah bagi perputaran roda perekonomian nasional hingga Desember 2000 Pemerintah sudah mengeluarkan tidak kurang dari Rp 659 triliun.

Akibatnya, utang Pemerintah yang sebelum krisis hanya US\$ 55 miliar, kini membengkak menjadi US\$ 77 miliar (utang luar negeri) ditambah Rp 695 triliun (utang dalam negeri terutama dalam bentuk obligasi rekapitalisasi) dalam waktu tidak sampai empat tahun terakhir. Utang sebesar itu membuat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai di atas 100 persen pada akhir 2000, yang akan mengakibatkan perekonomian Indonesia pada 10-25 tahun ke depan akan terus mengalami proses destabilisasi.

Untuk bunga obligasi rekapitalisasi saja Pemerintah harus mengeluarkan sekitar empat persen dari PDB pada tahun 2000 dan 2001 ini. Kewajiban obligasi

⁷¹ I. Wibowo, Francis Wahono. Neoliberalisme. Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas. Yogyakarta. 2003

yang jatuh tempo pada tahun 2001 sekitar Rp 12.9 triliun. Jumlah ini akan terus meningkat setiap tahunnya, mencapai Rp 73,98 triliun pada tahun 2007 dan Rp 138 triliun pada 2018. Biaya ini dibebankan pada APBN, yang berarti rakyat juga yang menanggungnya (baca tulisan saya di opini detik.com tanggal 30 April 2008 tentang "Beban Obligasi Rekap"). Beban bunga obligasi akan semakin menjadi-jadi dengan terus naiknya suku bunga. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) saat itu sudah mencapai 17.7%. Naik dari sekitar 10% pada Semester I tahun 2000 lalu. Padahal, setiap kenaikan suku bunga sebesar satu persen, akan menyebabkan biaya bunga obligasi yang harus dibayar Pemerintah naik Rp 2,2 triliun.

Buruknya kinerja sektor perbankan ini ternyata terus berlangsung hingga saat ini. Sepanjang tahun 2004 saja sudah ada 4 bank ditutup, yaitu Bank Asiatic, Bank Dagang Bali, Bank Global, dan Bank Persyarikatan Indonesia. Akibat penutupan itu Pemerintah tentu harus menanggung seluruh kerugian nasabah. Biaya penanggungan itu lagi-lagi dibebankan kepada rakyat melalui APBN. Hal itu belum ditambah dengan kasus pembobolan yang dilakukan oleh sejumlah orang ke Bank BNI dan BRI yang nilainya mencapai miliaran. Bahkan, triliunan rupiah.

Sampai saat ini tanggungan Pemerintah untuk dunia perbankan belum juga susut. Tercatat 10 bank besar Indonesia masih menikmati obligasi Pemerintah. Hal itu membuat APBN membayar bunganya sekitar Rp 60 triliun setiap tahunnya. Sekali lagi, beban itu tetap harus kembali kepada rakyat melalui pembayaran pajak. Di sisi lain, sesuai dengan 'petunjuk' IMF, bank-bank yang sudah mulai sehat harus

diprivatisasi mengikuti saudara-saudaranya yang lain di lingkup BUMN. Contohnya, sebanyak 51% saham Pemerintah yang ada di bank besar seperti BCA dan Bank Danamon harus dijual ke investor asing. Nasib yang sama juga menimpa BUMN sehat lainnya seperti Indosat Tbk, Telkom Tbk, Wisma Nusantara Indonesia, Bukit Asam Tbk, Semen Gresik, Pelindo II, dan lain-lain.

3. Munculnya kesenjangan ekonomi. Dampak dari pembangunan ekonomi bercorak liberalistik yang paling menyakitkan adalah terjadinya kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Pada masa Orde Baru ketimpangan ekonomi sudah sangat mencolok. Pada tahun 1993 omset dari 14 konglomerat Indonesia terbesar yang tergabung dalam grup Praselya Mulya di antaranya Om Liem (Salim Group), Ciputra (Ciputra Group), Mochtar Riady (Lippo Group), Suhargo Gondokusumo (Dharmala Group), Eka Tjipta (Sinar Mas Group) mencapai 47,2 triliun rupiah atau 83% APBN Indonesia tahun itu. Di sisi lain, jumlah penduduk miskin sudah terhampar sedemikian besarnya. Menurut data BPS 1994, dengan garis kemiskinan Rp 500 per hari, terdapat 28 juta rakyat miskin (2 juta di kota dan 26 juta di desa).

Di era sekarang ini, keadaannya telah mengalami banyak perubahan ke arah yang lebih mengkhawatirkan. Fenomena yang paling mencolok adalah terjadinya kekuasaan menjadi kekuatan pengumpul modal. Itulah sebabnya, kebijakan Pemerintah dalam pengembangan proyek lebih banyak untuk memenuhi kepentingan orang kaya ketimbang rakyat miskin. Itulah beberapa fakta 'menyakitkan' akibat diterapkannya ekonomi Neoliberalisme, khususnya di Indonesia. Akankah kita diam

saja menyaksikan semua ini. Kesabaran rakyat sudah habis. Saatnya momentum Kebangkitan Nasional ini rakyat menggugat agar pasal 33 UUD 1945 dilaksanakan dengan benar demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

5. Antara Muhammadiyah dan Neoliberalisme

Misi neoliberalisme dan globalisasi pada kenyataannya tidak hanya berpengaruh pada kehidupan ekonomi dan politik, tapi juga kehidupan sosial masyarakat. Tatanan sosial, budaya, beserta institusi norma, secara langsung dan tak langsung juga tak lepas dari pengaruh dua arus besar ini. Pada titik inilah, gerakan sosial baru diperlukan sebagai gerakan alternatif. Dalam konteks inilah, hanya ada dua pilihan bagi asosiasi sosial: mengikuti arus, atau menjadi lokomotif gerakan alternatif. Problem ini juga yang dihadapi oleh Muhammadiyah. Sebagai organisasi *civil society* yang besar di Indonesia, Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi penyeimbang negara dan pasar yang menjadi kepanjangan tangan neoliberalisme.

Posisi Muhammadiyah dalam karakteristik Islam Indonesia karena itu menjadi bagian yang tidak mungkin untuk dipisahkan dengan gerakan masyarakat sipil yang berkehendak melakukan gerakan sosial. Oleh karena itu Muhammadiyah sebagai gerakan sosial perlu melakukan kajian serius tentang (neoliberalisme) politik dan ekonomi sehingga ditemukan apa manfaat dan mudharatnya.⁷²

⁷² Globalisasi, Neoliberalisme dan the New Sosial Movement : Pengalaman Muhammadiyah oleh Zuly Qodir, Jogjakarta, 18 Agustus 2007